

**TINGKAT KESEHATAN DAN EFISIENSI
BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

Deni Kusumawardani, Tri Haryanto, dan Wisnu Wibowo
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

ABSTRACT

The study aims to measure bank soundness of rural bank or micro bank (BPR) and its branches in East Java; to compare efficiency rate among the rural bank branches; and to test a correlation between the bank soundness and the efficiency rate of the branches. The bank soundness measurement is adopted from Central Bank criteria of CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity) whereas the efficiency rate is measured by DEA (Data Envelopment Analysis) method. The correlation is tested using Spearman's correlation. The results show that rural bank and its branches perform good in the bank soundness; however, the branches present less efficient performances. Statistical test suggests that there is no significance correlation between the bank soundness and the efficiency rate.

Keywords: rural bank, mico bank, bank soundness, bank efficiency, DEA, CAMEL, Spearman's correlation.

1. PENDAHULUAN

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua peranan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam hal ini, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga yang dapat menciptakan uang dan hampir seluruh proses perputaran uang dalam perekonomian terjadi melalui perbankan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank sangat tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan hidup perbankan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat sehingga bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak hanya mengakibatkan krisis perbankan, tetapi lebih luas berdampak pada krisis keuangan, bahkan krisis perekonomian seperti yang dialami Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Kondisi

tersebut mudah dipahami mengingat sektor perbankan di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya, masih mendominasi sektor keuangan. Menurut Husein (2003) dalam Bank Indonesia (2004), industri perbankan di Indonesia menguasai sekitar 93 persen dari total aset industri keuangan.

Kesehatan bank merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan kegiatan operasional perbankan, serta menciptakan stabilitas moneter dan makroekonomi. Kajian dan analisis tentang keterkaitan antara kesehatan sistem perbankan dengan kondisi makroekonomi dan moneter suatu negara telah banyak dibahas. Menurut Crockett (1997) stabilitas dan kesehatan sektor perbankan sebagai bagian dari stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu perekonomian. Kajian yang dilakukan oleh Lindgren and Garcia (1996) serta Guitan (1997) menunjukkan bahwa banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat dari tidak sehatnya sektor perbankan.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan nasional telah merumuskan cetak biru, yang dikenal dengan Arsitek Perbankan Nasional (API), untuk membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu rekomendasi API adalah meningkatkan permodalan minimum bank umum (baik konvensional maupun syariah) sebesar Rp 100 miliar selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Ketentuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan profitabilitas serta memperbaiki efisiensi usaha bank. Kenyataan menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki modal di bawah Rp 100 miliar pada umumnya memiliki profitabilitas dan tingkat efisiensi yang rendah. Profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) hanya sebesar 1,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan industri perbankan nasional yang memiliki ROA sebesar 2,2 persen. Demikian juga dengan tingkat efisiensi yang diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) mencapai 136,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan nasional yang memiliki BOPO sebesar 91,5 persen.

Selain penataan dan pengaturan bank umum, pemerintah juga memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan bank perkreditan rakyat (BPR) seiring dengan komitmen untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk perhatian dan komitmen tersebut ditunjukkan melalui peningkatan peran serta BPR dalam program penguatan struktur perbankan nasional. Dalam API disebutkan bahwa daya saing BPR diperkuat melalui kegiatan meningkatkan *linkage program* antara bank umum dengan BPR, mempermudah pembukaan kantor cabang BPR, dan memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR (BI, 2004).

Fakta menunjukkan bahwa BPR mencatat kinerja yang lebih baik dari pada bank umum. Total aset BPR pada triwulan III 2005 mencapai Rp19,4 triliun atau meningkat 5,5 persen dari triwulan II 2005, sebagai akibat meningkatnya jumlah kredit yang didukung

dengan peningkatan jumlah dana pihak ketiga (DPK). Lebih besarnya kenaikan kredit dibanding dengan kenaikan DPK mengakibatkan profitabilitas BPR meningkat cukup besar yang ditandai dengan naiknya ROA dari 1,9 persen menjadi 2,7 persen. Selain itu, banyak BPR yang telah memiliki modal diatas Rp100 miliar yang lebih tinggi dari modal beberapa bank umum walaupun BPR memiliki kegiatan usaha yang terbatas. Membaiknya kinerja BPR tersebut antara lain sebagai hasil dari peningkatan kerjasama BPR dengan bank umum dan lembaga-lembaga lain (*linkage program*). Sampai dengan September 2005 telah terjalin *linkage program* antara 22 bank umum dengan 2.107 BPR dengan plafon kredit mencapai Rp 2.068 miliar (BI, 2005).

Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (BPR Jatim) merupakan bank yang dibentuk dari hasil penggabungan dan konsolidasi dari perubahan badan hukum 66 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur (PD. BPR KURK Jatim). Saat ini PT. BPR Jatim memiliki 23 kantor cabang yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Perkembangan kinerja BPR Jatim menunjukkan hasil yang positif. Jumlah asset meningkat dari 194,49 miliar tahun 2004 menjadi 258,37 miliar tahun 2005, dengan peningkatan modal bank dari Rp 31,836 miliar menjadi Rp 34,319 miliar. Sementara itu, jumlah kredit yang disalurkan pada tahun 2005 mencapai Rp 173,45 miliar, yang berarti mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 147,32 miliar. Kinerja bagus tersebut telah membawa BPR Jatim sebagai bank sehat menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kesehatan dan efisiensi perbankan merupakan fokus perhatian dalam penilaian dan evaluasi tentang kinerja bank, baik bank umum maupun BPR. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengukur tingkat kesehatan BPR Jatim dan kantor cabang BPR Jatim, 2) mengukur dan membandingkan tingkat efisiensi kantor cabang BPR Jatim, serta 3) menguji hubungan antara indikator tingkat kesehatan dengan tingkat efisiensi kantor cabang BPR Jatim.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank sebagai Lembaga Intermediasi

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan (*financial institutions*) yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari unit surplus untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada unit defisit. Yang dimaksud dengan unit surplus adalah orang-orang atau lembaga yang memiliki kelebihan dana (likuiditas), sedangkan unit defisit adalah unit rumah tangga atau perusahaan yang menggunakan dana untuk kegiatan konsumsi atau kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan dapat memberi keuntungan di masa yang akan datang (Manurung dan Pratama, 2004).

Sebagai salah satu lembaga intermediasi, BPR mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank umum. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Siamat, 1999),

usaha BPR meliputi : a) menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, b) memberikan kredit, c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan d) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Deposito Berjangka (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Sementara itu, BPR tidak diperbolehkan untuk : a) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, c) melakukan penyertaan modal, d) melakukan usaha perasuransian, dan e) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Berdasarkan karakteristik usaha BPR tersebut, maka kegiatan intermediasi yang dilakukan oleh BPR tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Prioritas utama pelayanan jasa keuangan BPR adalah individu dan pengusaha skala kecil dengan pangsa pasar masyarakat menengah ke bawah dan pedesaan. Dengan keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) atau *small and medium enterprises (SMEs)* yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian, maka peranan BPR menjadi sangat strategis dalam menciptakan struktur perbankan yang kuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2. Tingkat Kesehatan Bank

Metode umum yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah bank secara menyeluruh adalah CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liquidity*). Kelima komponen dalam metode tersebut saling berkaitan dalam menentukan kondisi bank. Tingkat kesehatan bank dinilai dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan berbagai dalam Metode CAMEL, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia dibedakan antara bank umum dan BPR. Perbedaan tersebut hanya pada bobot masing-masing faktor CAMEL.

Tabel 1
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Camel

No.	FAKTOR CAMEL	BOBOT	
		Bank Umum	BPR
1.	Permodalan	25%	30%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3.	Kualitas Manajemen	25%	20%
4.	Rentabilitas	10%	10%
5.	Likuiditas	10%	10%

Sumber : BI (2004)

Berdasarkan penjumlahan dari nilai kredit dari faktor-faktor CAMEL sesuai bobotnya, kemudian dikurangi dengan penalti karena pelanggaran atas ketentuan yang mempengaruhi tingkat kesehatan, maka diperoleh total nilai kredit tingkat kesehatan bank. Selanjutnya total nilai tersebut akan menentukan tingkat kesehatan bank dengan kriteria sebagai berikut :

- 81 – 100 predikat SEHAT
- 61 - < 81 predikat CUKUP SEHAT
- 51 - < 66 predikat KURANG SEHAT
- 0 - < 51 predikat TIDAK SEHAT

Menurut Manurung dan Pratama (2004), pelaksanaan penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL dilakukan sebagai berikut : a) permodalan, ditentukan oleh besarnya Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), b) kualitas aktiva produktif, dilakukan dengan menilai 2 (dua) rasio, yaitu rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio Cadangan Aktiva Produktif (CAP) terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Adapun aktiva produktif diklasifikasikan menjadi 50% dari aktiva produktif kurang lancar, 75% dari aktiva produktif diragukan, dan 100% dari aktiva produktif macet, c) manajemen, mencakup beberapa komponen : manajemen permodalan, manajemen kualitas aset, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Setiap komponen manajemen tersebut diberi bobot dan nilai, d) rentabilitas, diukur dengan ROA dan BOPO, d) likuiditas, didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan terhadap rasio realisasi pinjaman terhadap DPK dibandingkan dengan target pinjaman terhadap DPK yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

2.3. Pengukuran Efisiensi

2.3.1. Efisiensi Unit Kegiatan Ekonomi

Indikator kinerja produsen dalam merespon dorongan ekonomi sering berguna untuk tujuan kebijakan, dan konsep efisiensi ekonomi memberikan fondasi teoritis sebagai suatu ukuran. Banyak literatur yang membahas tentang efisiensi didasarkan secara langsung atau tidak langsung pada hasil karya Farrell (1957), yang menyatakan bahwa efisiensi dapat diukur secara relatif sebagai suatu deviasi dari usaha terbaik produsen dibandingkan dengan kelompok produsen. Farrell juga memperkenalkan perbedaan antara efisiensi teknis (*technical efficiency*), yaitu *output* maksimum diperoleh dari kombinasi *input* tertentu, dan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*) yang pada harga *input* tertentu penggunaan *input* menghasilkan profit maksimum bagi produsen. Efisiensi teknis hanya menunjukkan karakteristik fisik dari proses produksi serta merupakan suatu tujuan perusahaan yang bersifat universal yang diterapkan pada berbagai sistem ekonomi, sedangkan efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi terkait dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan profit.

Metode yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) adalah analisis rasio parsial, analisis regresi berganda, dan *Data Envelopment Analysis* atau *DEA* (PAU UGM, 2000). Analisis rasio parsial merupakan metode sederhana untuk menghitung tingkat efisiensi UKE dengan multi *output* dan multi *input*. Kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat menentukan UKE yang paling efisien karena tidak ada konsensus untuk menentukan tingkat efisiensi. Analisis regresi berganda memberikan hasil yang cukup memadai karena menghasilkan ukuran efisiensi untuk setiap UKE, namun angka efisiensi tersebut bersifat relatif terhadap kinerja rata-rata, bukan terhadap kemungkinan kinerja terbaik. Selain itu, kelemahan dari analisis regresi berganda adalah adanya penggabungan setiap jenis *output* menjadi satu karena metode ini mensyaratkan hanya terdapat satu variabel tergantung (*output*).

Metode DEA mampu mengatasi keterbatasan dari analisis rasio parsial dan analisis regresi berganda. Metode ini dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu UKE yang menggunakan multi *output* dan multi *input*. Efisiensi suatu UKE dinyatakan secara relatif dibandingkan dengan UKE lainnya dalam sampel yang menggunakan jenis *input* dan *output* yang sama. Efisiensi didefinisikan sebagai rasio dari total *output* tertimbang dibagi dengan total *input* tertimbangnya. DEA mengasumsikan bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya. Bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari *input* dan *output*nya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi. Suatu UKE dikatakan efisien jika memiliki skor efisiensi sebesar 1 atau 100% dan dikatakan kurang efisien jika skor efisiensinya kurang dari 1 atau 100%. Jika suatu UKE kurang efisien, maka DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi (*efficient reference set*) dan seperangkat angka pengganda (*multiplier*) yang digunakan sebagai referensi atau *benchmark* untuk menyusun strategi perbaikan.

Metode DEA merupakan pendekatan non parametrik yang menghasilkan *production frontier*, berbeda dengan pendekatan parametrik yang menghasilkan *stochastic cost frontier*. Dengan demikian, DEA tidak memasukkan *random error* serta lebih sedikit sampel dan asumsi yang dibutuhkan karena tidak melakukan kesimpulan secara statistik. Kelemahan dari metode ini adalah satu *outlier* dapat secara signifikan mempengaruhi perhitungan efisiensi. Selain itu, DEA tidak dapat memperkirakan adanya *sample error* yang tidak terhitung, khususnya jika variabel *input* dan *output* relatif lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya observasi. Namun demikian, jika sampel yang dianalisis merupakan unit yang sama dan menggunakan proses produksi yang sama, DEA akan memberikan hasil yang hampir sama dengan pendekatan parametrik (Hadad dkk, 2003).

2.3.2. Efisiensi Bank

Kesulitan utama dalam pengukuran *output* bank muncul karena tidak adanya konsensus dalam literatur tentang bagaimana mendefinisikan dan mengukur jasa tersebut. Secara luas, *output* bank seharusnya mencakup pengelolaan portofolio dan jasa konsultasi yang

disediakan oleh bank dalam kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi. Di samping itu, tidak adanya harga eksplisit juga menyebabkan masalah signifikan dalam pengukuran jasa-jasa finansial. Kesulitan mendasar muncul dalam memperlakukan simpanan bank (*bank deposit*) pada status *input-output* dari deposit tersebut. Pada umumnya, deposit dipandang sebagai *input* utama produksi pinjaman dan penerimaan/perolehan dari *earning assets*. Namun demikian, produksi deposit yang bernilai tambah tinggi seperti tabungan, rekening koran, dana investasi, deposito dalam valuta asing, menegaskan karakteristik output dari deposit. Lebih jauh, jasa-jasa deposit yang bernilai tambah tinggi merupakan sumber komisi dan penerimaan *fee* yang penting bagi bank. Oleh karena itu, ciri-ciri output dari deposit tidak dapat diabaikan. Deposit, dengan demikian secara simultan merupakan suatu *input* dalam proses pinjaman dan suatu output, dalam arti bahwa deposit dibeli sebagai produk akhir yang disediakan jasa keuangan.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) metode yang telah dikembangkan untuk mendefinisikan hubungan *input – output* dalam lembaga keuangan, yaitu :

- a. Pendekatan Produksi (Sherman dan Gold, 1995), menganggap bahwa model lembaga keuangan sebagai produsen atas deposit dan pinjaman. *Output* dinyatakan sebagai jumlah dari rekening-rekening tersebut, sedangkan *inputnya* diwakili oleh jumlah tenaga kerja dan pengeluaran modal pada aktiva tetap.
- b. Pendekatan Intermediasi (Berger dan Humphrey, 1997), menitikberatkan pada peran lembaga keuangan sebagai perantara yang mentransfer dana dari unit ekonomi yang mengalami surplus ke unit ekonomi yang mengalami defisit. Berdasarkan pendekatan ini, biaya operasi dan biaya bunga secara umum menggambarkan *input* utama. Sementara pendapatan bunga, total pinjaman, total deposit dan pendapatan selain bunga dianggap sebagai *input*.
- c. Pendekatan Aset (Favero dan Papi, 1995), memandang lembaga keuangan sebagai pencipta pinjaman dan mendefinisikan *output* sebagai stok pinjaman dan aset investasi.

Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan intermediasi lebih banyak digunakan dalam penelitian-penelitian empiris. Pendekatan ini dianggap lebih *adaptable* karena kategori deposit, pinjaman, investasi keuangan dan hutang ditentukan sebagai salah satu *input* atau *output* (Colwell dan Devis, 1992).

Penelitian untuk mengukur tingkat efisiensi bank dengan menggunakan DEA telah banyak dilakukan. Leong, et al (2002) menggunakan Model DEA yang dikembangkan oleh Bauer et. al (1997) untuk mengukur efisiensi bank di Singapura. Penelitian tersebut menggunakan data tahun 1993-1999 dengan jumlah observasi sebanyak 35 bank. Kesimpulan penting dari penelitian tersebut adalah : Pertama, efisiensi bank dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : *agency problem* (organisasi dan manajemen internal bank), regulasi dan faktor kelembagaan, manajemen risiko, dan teknologi. Kedua, skor efisiensi dari DEA mempunyai hubungan yang konsisten dan stabil dengan tingkat kompetisi

industri, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pasar keuangan. Ketiga, DEA dapat digunakan untuk melihat variable-variabel yang mempengaruhi efisiensi bank sepanjang waktu.

Pada tahun yang sama, Leong dan Dollery (2002) melakukan penelitian untuk membandingkan skor efisiensi yang dihasilkan oleh DEA dengan model tradisional pengukuran kinerja bank di Singapura. Penelitian tersebut menggunakan Model DEA yang dikembangkan oleh Barr et al. (1999) yang dikenal dengan *the longitudinal efficiency analysis approach*. Dengan menggunakan data keuangan tahun 1993-1999, penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa ada keterkaitan yang erat antara skor efisiensi DEA dengan metode tradisional untuk mengukur *profitability, institutional size, risk management and soundness*. Bank dengan kinerja keuangan yang bagus, seperti *Return on Average Assets (ROAA)* dan *Capital Adequacy Ratios (CAR)* yang tinggi dan *Loan-to-asset ratios* yang rendah lebih efisien dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hubungan tersebut berlaku sepanjang waktu untuk jangka panjang. Temuan lain dari penelitian tersebut adalah bahwa ada korelasi positif antara tingkat efisiensi dengan variabel *output*, tetapi tidak berlaku untuk variabel *input* dalam DEA.

Penelitian tentang efisiensi bank di Indonesia telah dilakukan salah satunya oleh Hadad dkk (2003). Penelitian tersebut ditujukan untuk melihat efisiensi antar bank secara individu dan menurut tipe bank dengan menggunakan data tahunan 1996-2003. Model analisis yang digunakan adalah DEA yang diadopsi dari Altunbas, et al. (2001) dengan sedikit modifikasi. Variabel-variabel yang digunakan adalah upah tenaga kerja (*price of labor*), tingkat bunga (*price of fund*), dan harga aktiva fisik (*price of physical capital*) sebagai variabel *input* sedangkan variabel *output*nya adalah pinjaman masyarakat (*public loan*), surat berharga (*securities*) dan pinjaman-pinjaman lain (*other loans*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank swasta non-devisa (*foreign exchange division*) merupakan bank yang paling efisien pada tiga tahun terakhir (2001-2003) selama periode waktu delapan tahun. Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa merger tidak selalu menghasilkan efisiensi pada industri perbankan di Indonesia, walaupun tindakan merger ditujukan untuk mendorong perbankan menjadi lebih efisien.

3. METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Analisis Tingkat Kesehatan BPR Jatim

Analisis ini didasarkan pada penilaian terhadap beberapa aspek dalam CAMEL yang meliputi: permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas (*earnings*), likuiditas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka BPR Jatim dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sehat dan tidak sehat/kurang sehat. Data yang digunakan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan panduan daftar pertanyaan

(kuesioner) kepada seluruh kantor cabang BPR Jatim dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan teraudit dari seluruh kantor cabang BPR Jatim selama tahun 2002 – 2006.

2. Analisis Tingkat Efisiensi BPR Jatim sebagai Unit Ekonomi.

Analisis ini didasarkan pada skor efisiensi yang diperoleh dari hasil estimasi model *DEA (Data Envelopment Analysis)*. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2005. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka BPR Jatim dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu efisien dan tidak/ kurang efisien. Selanjutnya, cabang BPR Jatim yang efisien menjadi *benchmark* untuk perbaikan manajemen pada cabang BPR Jatim yang tidak/kurang efisien melalui simulasi dengan menggunakan *multiplier DEA*.

Langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan DEA adalah menentukan *output* dan *input* unit kegiatan ekonomi. Selanjutnya menghitung rasio seluruh *output* terhadap seluruh *input* sebagai $u'y_i/v'x_i$, di mana u adalah vektor bobot *output* $M \times 1$ dan v adalah vektor bobot *input* $K \times 1$. Bobot optimal diperoleh melalui pemecahan problema programasi linear sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll} \text{maksimumkan} & u'y_i/v'x_i \\ \text{kendala} & u'y_j/v'x_j \leq 1, \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, N \\ & u, v \geq 0 \end{array} \quad (1)$$

Cara ini merupakan penentuan nilai u dan v sedemikian rupa sehingga ukuran efisiensi dari unit kegiatan ke- i adalah maksimum dihadapkan kendala bahwa seluruh ukuran efisiensi harus kurang atau sama dengan satu. Namun demikian, karena formulasi rasio mempunyai kemungkinan solusi tidak terhingga, maka untuk menghindari hal tersebut salah satunya dengan membatasi $v'x_i = 1$, yang menghasilkan:

$$\begin{array}{ll} \text{maksimumkan} & u'y_i/v'x_i \\ \text{kendala} & v'x_i = 1, \\ & \mu'y_j - v'x_j \leq 0, \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, N \\ & \mu, v \geq 0 \end{array} \quad (2)$$

Persamaan (2) dikenal sebagai pengganda dari DEA.

Model DEA yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan intermediasi dengan spesifikasi variabel : pinjaman sebagai variabel *output*, dan simpanan serta aktiva tetap sebagai variabel *input*. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program CMOM.

3. Analisis Hubungan antara Indikator Tingkat Kesehatan dengan Skor Efisiensi

Pengujian dilakukan dengan *Spearman Rank Order Correlation*. Alat analisis ini digunakan untuk melihat hubungan 2 (dua) variabel dengan skala pengukuran data

minimal ordinal. Hubungan tersebut didasarkan pada ranking dari objek yang diamati. Indikator tingkat kesehatan bank yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Asset (ROA)*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* sedangkan skor efisiensi diperoleh dari hasil perhitungan Model DEA. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2005.

Prosedur estimasi dan pengujian dari Korelasi Spearman adalah sebagai berikut :

1. Melakukan ranking pada variabel yang diamati (misalnya X_1 dan X_2)
2. Jika terdapat nilai pengamatan yang sama, maka dihitung rata-ratanya
3. Menentukan selisih ranking (d_i) untuk setiap pasang variabel
4. Menghitung nilai statistik r_s dengan rumus :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \dots\dots\dots (3)$$

5. Jika terdapat nilai pengamatan yang sama, maka nilai statistik r_s dihitung dengan rumus :

$$r_s = 1 - \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \dots\dots\dots (4)$$

6. Melakukan uji signifikansi r_s dengan statistik t :

$$t = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \dots\dots\dots (5)$$

Jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima atau H_1 ditolak, artinya secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sebaliknya, jika $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, artinya secara terdapat hubungan yang signifikan.

4. HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Usaha BPR Jatim

Sejak berdiri tahun 2001, BPR Jatim terus menunjukkan perkembangan usaha yang mengembirakan, baik dari segi total aset, penghimpunan dana, aktivitas penyaluran kredit maupun permodalan. Total aset yang menggambarkan volume kekayaan perusahaan menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pada akhir tahun 2002, total aset BPR Jatim baru tercatat sebesar Rp 82,04 miliar, namun pada posisi akhir Juni 2006 telah menjadi Rp 317,5 miliar atau mengalami peningkatan 287 persen.

Tabel 2
Perkembangan BPR Jatim (dalam ribuan rupiah)
Tahun 2002 – 2006

TAHUN	ASSET	DPK	KREDIT	MODAL
2002	82.043.270	59.584.381	59.606.457	16.938.674
2003	159.203.384	120.117.796	116.661.291	27.180.879

TAHUN	ASSET	DPK	KREDIT	MODAL
2004	194.494.616	150.392.407	145.879.279	31.289.760
2005	258.371.387	182.874.000	173.453.320	34.319.000
2006*	317.503.640	217.021.250	182.948.902	47.320.776

Sumber : PT. BPR Jatim

* Per Juni 2006

Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh BPR Jatim menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika pada akhir tahun 2002 baru mencapai Rp 59,6 miliar, maka pada akhir Juni 2006 telah meningkat menjadi Rp 217,02 miliar atau meningkat sebesar 264 persen dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 22 persen. Peningkatan dalam aktivitas penghimpunan dana (*funding*) juga diikuti dengan peningkatan kemampuan BPR Jatim dalam menyalurkan kredit ke masyarakat (*lending*). Dalam lima tahun terakhir, kredit yang disalurkan rata-rata tumbuh sebesar 36 persen, jauh di atas pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 20 persen. Pada akhir 2005, komposisi kredit yang disalurkan mencapai sebesar 69 persen dari total aktiva produktif.

Aspek permodalan merupakan aspek penting bagi sebuah bank. Semakin besar modal bank, semakin besar kemampuan bank dalam menjamin keamanan dana nasabah. Hingga akhir 2005 modal BPR Jatim sebesar Rp 34,3 Miliar, meningkat dari posisi akhir 2002 yang hanya sebesar Rp 16,9 miliar. Pada semester pertama 2006, modal telah berkembang lagi menjadi sekitar Rp 47 miliar. Peningkatan modal tersebut menunjukkan kinerja bank yang semakin meningkat dan kepercayaan yang besar dari stakeholder.

4.2. Perkembangan Kinerja Keuangan BPR Jatim

Kinerja keuangan dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan efisiensi, dan likuiditas. Aspek permodalan dapat dilihat dari indikator rasio kecukupan modal (CAR), yang dihitung dari perbandingan antara modal terhadap ATMR. Sejak tahun 2002 hingga Juni 2006, tercatat bahwa nilai CAR BPR Jatim selalu di atas ketentuan minimal berdasarkan peraturan BI sebesar 8%. Dengan demikian, dilihat dari sisi permodalan, BPR Jatim tergolong bank dengan kategori sehat

Kualitas aktiva yang dimiliki bank juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas aktiva adalah *Ratio of Productive Asset Quality (PAQ)* atau Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), yang dihitung dari perbandingan antara jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif. Menurut ketentuan BI, Rasio KAP tidak boleh lebih dari 10,35 persen. Dari data laporan keuangan diperoleh bahwa rasio KAP BPR Jatim selama periode 2002-2006 terendah 0,08 persen dan tertinggi 0,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut BPR Jatim termasuk kategori sehat.

Rentabilitas artinya kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, diukur dengan menggunakan indikator ROA, yang merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan

total aktiva. Berdasarkan ketentuan BI, bank yang sehat harus memiliki ROA di atas 1,215 persen. Dari data indikator keuangan, ternyata ROA BPR Jatim selama periode 2002-2005 tercatat selalu di atas 3 persen, berarti termasuk dalam kategori bank yang sehat.

Kemampuan yang cukup tinggi untuk menghasilkan keuntungan juga terkait dengan tingkat efisiensi operasional bank. Bank yang efisien akan mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Efisiensi operasional bank dapat dilihat dari indikator BOPO (rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional). Bank dikatakan efisien/sehat jika nilai BOPO tidak lebih dari 93,52 persen. Dengan melihat data lima tahun terakhir, maka dapat dikatakan bahwa BPR Jatim termasuk dalam kategori bank yang efisien atau sehat secara operasional.

Penilaian terhadap kemampuan likuiditas bank dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, menggunakan *Cash Ratio (CR)* yang dihitung dari perbandingan antara alat likuid (uang kas dan penempatan pada bank lain selain giro) terhadap jumlah kewajiban lancar (kewajiban segera, tabungan dan deposito berjangka). Dilihat dari indikator ini, ternyata selama periode 2002-2005, BPR Jatim selalu memiliki nilai CR di atas 12 persen, yang berarti jauh di atas ketentuan yang diwajibkan oleh BI sebesar minimal 5 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk menilai aspek likuiditas adalah *Loan to Deposits Ratio (LDR)*, yang dihitung berdasarkan rasio antara jumlah kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga (DPK) ditambah modal inti. Berdasarkan perhitungan tersebut, angka LDR BPR Jatim selama periode 2002-2005 mencapai angka di atas 70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bank cukup mampu memainkan fungsi intermediasinya, guna mendorong kinerja sektor riil. Bahkan, BPR Jatim masih memiliki peluang untuk melakukan ekspansi kredit, mengingat angka LDR yang dicapai masih dibawah ketentuan BI sebesar 94,75 persen.

Tabel 3
Rasio Keuangan BPR Jatim Tahun 2002-2006

Komponen	2002	2003	2004	2005	2006	Ketentuan BI	Kategori
CAR	25,77	21,08	19,42	17,35	21,70	Min 8%	Sehat
PAQ	0,20	0,08	0,14	0,22%	0,65%	Max 10,35%	Sehat
ROA	4,67	3,37	4,09	3,00%	3,00	Min 1,215%	Sehat
BOPO	86,71	83,21	82,58	82,97	69,02	Max 93,52%	Sehat/efisien
CR	32,31	12,20	16,13	41,93%	n.a.	Min 5%	Sehat
LDR	75,70	79,52	79,17	77,86	70,14%	Max 94,75	Sehat

Sumber : PT. BPR Jatim

* Per Juni 2006

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kinerja bank secara menyeluruh, meliputi semua aspek dalam penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip

CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management Quality, Earning/Rentability* dan *Liquidity*). Hasil penilaian Bank Indonesia terhadap tingkat kesehatan BPR Jatim selama periode 2002-2005 menunjukkan bahwa BPR Jatim terbukti mampu mengendalikan operasinya dengan baik, sehingga dapat mempertahankan predikat bank sehat. Hampir semua komponen penilaian memperoleh skor maksimal, hanya aspek manajemen yang tampaknya masih perlu untuk disempurnakan di masa mendatang.

Tabel 4
Perkembangan Tingkat Kesehatan BPR Jatim Tahun 2002 – 2005

Tahun	S k o r					Total	Predikat
	Permodalan	Kualitas Aktiva Produktif	Kualitas Management	Rentabilitas	Likuiditas		
2002	30,00	30,00	16,40	10,00	10,00	96,40	SEHAT
2003	30,00	30,00	16,20	10,00	10,00	96,20	SEHAT
2004	30,00	30,00	17,80	10,00	10,00	97,80	SEHAT
2005	10,00	10,00	16,80	10,00	10,00	96,80	SEHAT

Sumber : PT. BPR Jatim

4.3. Perkembangan Kinerja Keuangan Kantor Cabang BPR Jatim

Data menunjukkan hampir semua cabang BPR Jatim memiliki CAR di atas ketentuan BI sebesar minimum 8 persen, dengan rata-rata sekitar 19 persen dalam periode waktu 2002 – 2006. Satu-satunya kantor cabang yang memiliki CAR di bawah 8 persen adalah Gresik dengan CAR tertinggi sebesar 4,89 persen pada tahun 2004. Oleh karena itu, kantor cabang Gresik perlu untuk menambah modal disetor dalam jangka pendek agar dapat memenuhi ketentuan modal minimum yang disyaratkan oleh BI. Dilihat dari perkembangan ROA, pada umumnya kantor cabang BPR Jatim telah memiliki ROA melebihi ketentuan BI sebesar 1,215 persen, kecuali Sidoarjo dengan ROA rata-rata sebesar -0,24 persen selama periode waktu 2002-2006.

Hasil rekapitulasi pencapaian kinerja BPR Jatim bila dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh BI sebesar 93,52 persen, menunjukkan kinerja yang baik. BOPO selama periode 2002-2006 rata-rata sebesar 89,36 persen, yang berarti di bawah standar yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2004 dengan rata-rata sebesar 100,63 persen dan tahun 2006 sebesar 95,38 persen. Penurunan efisiensi pada dua tahun tersebut terjadi karena adanya pembukaan cabang baru, yaitu di Sidoarjo pada tahun 2004 dan Jember pada tahun 2006 yang membutuhkan dana operasional yang besar.

Likuiditas bank menjadi isu sentral perbankan di Indonesia mengingat BI sejak tahun 2004 telah melepaskan tanggung jawab atas jaminan simpanan masyarakat. Sebagai gantinya BI telah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi untuk menjamin dana nasabah bank sampai pada jumlah tertentu. Pada tahun 2007 besarnya

dana simpanan masyarakat yang bisa dijamin hanyalah sebesar Rp 100 juta. Kondisi ini menuntut perbankan untuk selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya, sehingga tidak mengherankan jika seluruh kantor cabang BPR Jatim rata-rata memiliki tingkat *cash rasio* yang cukup besar, yaitu sebesar 23,58 persen. Angka tersebut jauh melebihi ketentuan *cash ratio* yang ditetapkan BI, sebesar minimum 5 persen. Kondisi ini dapat dikatakan baik dari kepentingan likuiditas bank, namun jika dilihat dari kemampuan asset dalam menghasilkan pendapatan, maka *cash ratio* yang besar harus dapat ditekan agar dana yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat.

Selama periode 2002-2006 tercatat tiap tahun LDR rata-rata berada pada kisaran 80 persen, artinya dari keseluruhan dana yang dihimpun dari masyarakat, 80 persennya disalurkan dalam bentuk kredit. Angka tersebut cukup bagus jika dibandingkan dengan ketentuan BI sebesar 94,75 persen. Jika dilihat perkembangan LDR per kantor cabang BPR Jatim, hanya ada 2 cabang yang memiliki LDR diatas ketentuan BI, yaitu Probolinggo (120,69 persen) dan Mojokerto (95,74 persen). Secara umum kantor cabang BPR Jatim masih memiliki potensi untuk memperbesar penyaluran kreditnya dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Perkembangan LDR dalam periode 2002 – 2006 menunjukkan trend yang menurun. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat mengakibatkan kelebihan likuiditas yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas BPR.

4.4. Tingkat Efisiensi Kantor Cabang BPR Jatim

Hasil pengolahan data analisis menunjukkan bahwa sebagian besar kantor cabang BPR Jatim kurang efisien (ditunjukkan dengan skor efisiensi kurang dari 1). Dari 22 kantor cabang hanya terdapat 2 kantor cabang saja yang mencapai efisiensi 100 persen, yaitu BPR Kediri dan BPR Lamongan. Selanjutnya kedua kantor cabang tersebut dijadikan sebagai referensi (*efficient reference set*) atau *benchmark* untuk meningkatkan efisiensi BPR lain yang kurang efisien.

Analisis DEA memiliki beberapa nilai manajerial. Selain menghasilkan efisiensi relatif suatu kantor cabang terhadap kantor cabang lainnya dalam suatu ukuran sampel tertentu, DEA juga menawarkan solusi untuk menyusun strategi perbaikan dalam rangka meningkatkan efisiensi kantor cabang yang kurang efisien. Berdasarkan formulasi DEA, ada 3 (tiga) alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi kantor cabang tersebut, yaitu : 1) mengurangi *input* (simpanan dan aktiva tetap) untuk mempertahankan tingkat *output* (pinjaman) yang sama. Secara matematis cara tersebut dilakukan dengan mengalikan skor efisiensi dengan besarnya *input* (simpanan dan aktiva tetap), 2) menambah tingkat *output* (pinjaman) dengan mempertahankan *input* (simpanan dan aktiva tetap) yang sama. Secara matematis cara tersebut dilakukan dengan membagi besarnya *output* (pinjaman) dengan skor efisiensi, 3) melakukan kombinasi tambahan atau pengurangan *input* (simpanan dan aktiva tetap) dan *output* (pinjaman) dengan mengacu pada kantor cabang referensi (*efficient reference set*) atau *benchmark*, yaitu Kediri dan Lamongan.

Secara matematis cara tersebut dilakukan dengan menambahkan hasil perkalian angka multiplier dengan *input* dan *output* dari kantor cabang referensi.

Tabel 5
Tingkat Efisiensi Kantor Cabang PT. BPR Jatim

No	Kantor Cabang	Efisiensi	Ranking	Referensi	
				BPR	Multiplier
1	Banyuwangi	0,7316	4	Kediri	1,1325
2	Kediri	1,000	1,5	-	-
3	Tulungagung	0,6474	10	Lamongan	3,4057
4	Nganjuk	0,5432	21	Kediri	0,1669
				Lamongan	0,5368
5	Mojokerto	0,5746	19	Lamongan	1,6578
6	Jombang	0,7018	9	Lamongan	2,2265
7	Blitar	0,5068	22	Lamongan	1,4086
8	Malang	0,6051	16	Lamongan	1,3314
9	Lumajang	0,6463	11	Lamongan	1,9645
10	Probolinggo	0,6043	17	Kediri	0,1224
				Lamongan	0,4064
11	Pasuruan	0,5630	20	Lamongan	1,7114
12	Sidoarjo	0,7242	7	Lamongan	1,0477
13	Gresik	0,7350	3	Kediri	0,1005
				Lamongan	0,8170
14	Lamongan	1,000	1,5	-	-
15	Pacitan	0,6251	13	Lamongan	2,6361
16	Trenggalek	0,7257	5	Kediri	0,7089
				Lamongan	1,3847
17	Ponorogo	0,6019	18	Lamongan	3,3787
18	Bangkalan	0,6284	12	Lamongan	1,1229
19	Pamekasan	0,7097	8	Lamongan	1,3882
20	Ngawi	0,6240	14	Lamongan	1,6640
21	Magetan	0,6079	15	Lamongan	1,7903
22	Madiun	0,7251	6	Kediri	0,4504
				Lamongan	0,0938

Sumber : hasil pengolahan

Pengurangan *input* (simpanan dan aktiva tetap) merupakan alternatif pertama yang dapat dilakukan oleh kantor cabang yang relatif kurang efisien untuk meningkatkan efisiensinya. Sebagai contoh kantor cabang Banyuwangi akan mencapai efisiensi 100% jika mengurangi simpanan dan aktiva tetap dari Rp 14.431 juta dan Rp 113 juta menjadi Rp 10.551 juta dan Rp 83 juta untuk menyalurkan pinjaman yang sama yaitu Rp 11.115 juta. Dengan kata lain, secara teknis simpanan yang dimiliki kantor cabang Banyuwangi saat ini dianggap terlalu besar Rp 3.873 juta untuk menghasilkan penyaluran pinjaman

sebesar Rp 11.115 juta. Demikian juga dengan aktiva tetap yang terlalu besar Rp 20 juta dari kondisi ideal. Namun demikian, di dunia perbankan pengurangan *input* (simpanan dan aktiva tetap) seperti itu tidak umum dilakukan. Dalam hal ini, justru terjadi persaingan yang ketat antar bank untuk meningkatkan variabel *input* tersebut, terutama simpanan masyarakat.

Tabel 6
Alternatif Peningkatan Efisiensi

No.	BPR	Alternatif 1		Alternatif 1		Alternatif 1	
		Simpanan	Aktiva Tetap	Simpanan	Aktiva Tetap	Simpanan	Aktiva Tetap
1	Banyuwangi	10,558	83	10,558	83	10,558	83
2	Kediri	-	-	-	-	-	-
3	Tulungagung	6,426	236	6,426	236	6,426	236
4	Nganjuk	2,342	31	2,342	31	2,342	31
5	Mojokerto	3,128	243	3,128	243	3,128	243
6	Jombang	4,201	110	4,201	110	4,201	110
7	Blitar	2,658	159	2,658	159	2,658	159
8	Malang	2,512	464	2,512	464	2,512	464
9	Lumajang	3,707	264	3,707	264	3,707	264
10	Probolinggo	1,742	23	1,742	23	1,742	23
11	Pasuruan	3,229	407	3,229	407	3,229	407
12	Sidoarjo	1,977	121	1,977	121	1,977	121
13	Gresik	2,342	37	2,342	37	2,342	37
14	Lamongan	-	-	-	-	-	-
15	Pacitan	4,975	423	4,975	423	4,975	423
16	Trenggalek	8,260	102	8,260	102	8,260	102
17	Ponorogo	6,376	330	6,376	330	6,376	330
18	Bangkalan	2,119	49	2,119	49	2,119	49
19	Pamekasan	2,619	302	2,619	302	2,619	302
20	Ngawi	3,140	279	3,140	279	3,140	279
21	Magetan	3,378	99	3,378	99	3,378	99
22	Madiun	3,764	36	3,764	36	3,764	36

Sumber : hasil pengolahan

Alternatif kedua yang dapat dilakukan oleh kantor cabang yang kurang efisien untuk mencapai tingkat efisiensi 100% adalah menambah pinjaman (*output*) dengan tetap menggunakan simpanan dan aktiva tetap yang sama (*input*). Misalnya dengan simpanan sebesar Rp 14.431 juta dan aktiva tetap sebesar Rp 113 juta, kantor cabang Banyuwangi dapat menyalurkan pinjaman sebesar Rp 15.192 juta, bukannya Rp 11.115 juta yang saat ini dilakukan. Artinya secara teknis pinjaman yang saat ini disalurkan terlalu kecil Rp 4.077 juta dibandingkan dengan yang seharusnya jika melihat kapasitas *input* (simpanan dan aktiva tetap) yang selama ini dimiliki. Cara ini merupakan solusi alternatif yang

paling mungkin dan umum dilakukan untuk meningkatkan efisiensi BPR. Dalam hal ini, BPR dituntut untuk lebih ekspansif dalam menyalurkan dana pihak ketiganya.

Solusi lain yang dapat digunakan BPR untuk meningkatkan efisiensinya adalah dengan menggunakan alternatif ketiga. Hasil perhitungan untuk masing-masing cabang PT. BPR Jatim menunjukkan bahwa solusi untuk alternatif ketiga sama seperti alternatif pertama, yaitu mengurangi simpanan dan aktiva tetap (*input*) untuk menyalurkan pinjaman yang sama.

4.5. Hubungan antara Indikator Tingkat Kesehatan dengan Skor Efisiensi

Hasil estimasi dan pengujian dengan menggunakan Korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara indikator tingkat kesehatan bank (CAR, ROA, dan LDR) dengan tingkat efisiensi dari kantor cabang BPR Jatim. Secara statistik, kesimpulan tersebut didasarkan pada nilai *p-value* > 0,05. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bank yang memiliki skor efisiensi yang tinggi akan cenderung memiliki kinerja bagus yang ditunjukkan oleh nilai CAR dan ROA yang tinggi serta LDR yang rendah. Sebagai contoh pada tahun 2005 kantor cabang Kediri memiliki CAR sebesar 10,15 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan CAR tertinggi pada tahun sebesar 37,88 persen yang dimiliki oleh Cabang Lamongan. Demikian juga dengan ROA kantor cabang Kediri sebesar 4,1 persen lebih rendah dibandingkan dengan kantor cabang Mojokerto sebesar 8,5 persen sebagai cabang dengan ROA tertinggi. Bahkan kantor cabang Lamongan yang efisien dari pengukuran DEA ternyata memiliki ROA di bawah ketentuan BI, yaitu hanya sebesar 0,1 persen. Kondisi ini sekilas memberikan indikasi bahwa masalah yang cukup esensial yang dihadapi kantor-kantor cabang BPR Jatim justru terletak pada kemampuan dalam menyalurkan dana masyarakat. Dengan kata lain, fungsi intermediasi pada kantor cabang BPR Jatim masih perlu ditingkatkan.

Tabel 7
HASIL KORELASI SPEARMAN

Indikator	Skor Efisiensi	Keterangan
CAR	$r_s = -0,395$ $p\text{-value} = 0,104$	Tidak signifikan
ROA	$r_s = 0,030$ $p\text{-value} = 0,895$	Tidak signifikan
LDR	$r_s = 0,410$ $p\text{-value} = 0,058$	Tidak signifikan

Sumber : hasil pengolahan

6.1. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis tersebut, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja keuangan yang menyangkut aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas dan likuiditas, menunjukkan bahwa BPR Jatim termasuk dalam kategori SEHAT. Demikian juga, capaian kinerja pada kantor cabang BPR Jatim bila dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh BI menunjukkan performa baik.
2. Analisis menggunakan Model DEA menunjukkan bahwa pada umumnya kantor cabang kurang efisiensi. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi, BPR sebagai lembaga intermediasi harus meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
3. Hasil pengujian Korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kesehatan bank dengan skor efisiensi DEA.
4. Penggunaan Model DEA untuk menentukan tingkat efisiensi sangat dipengaruhi oleh pemilihan model *input* dan *output* yang digunakan. Dengan demikian, penelitian tingkat efisiensi bank dengan menggunakan model *input* dan *output* yang berbeda atau model lain perlu dilakukan sebagai pembandingan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afif, Faisal, dkk (1996), *Strategi dan Operasional Bank*, ERESKO, Bandung.
- Bank Indonesia (2004), *Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta.
- Bank Indonesia (2005), *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2005*, Jakarta.
- Barr, R.S., et al. (1999), "Evaluating the productive efficiency and performance of US commercial banks", *Financial Industry Studies Working Paper 99-3*, Federal Reserve Bank of Dallas, Dallas.
- Berger, A.N. and Humphrey, D.B. (1997), "Efficiency of financial institutions :International survey and directions for future research", *European Journal of Operational Research*.
- Colwell, R.J. and Davis, E.P. (1992), "Output and productivity in banking", *Scandinavian Journal of Economics*, 94, 111–129.
- Crockett, Andrew (1997), "Maintaining Financial Stability in Global Economy", *A Symposium Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, August 28-30, Book of Business*, New York.
- Farrell, M.J. (1957), "The measurement of productive efficiency", *Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)* 120, 253–289.
- Favero, C.A. and Papi, L. (1995), "Technical efficiency and scale efficiency in the Italian banking sector : A non-parametric approach", *Applied Economics*, 27, 385–395.

- Guitan, Manuel (1997), *Banking Soundness : The Other Dimension of Monetary Policy*, Edited by Charle Enoch and John Green, IMF.
- Hadad D. Muliawan, et al., (2003). *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Nonparametrik Data Envelopment Analysis*, Bank Indonesia, Jakarta.
- P.T. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, *Laporan Tahunan*, 2002 – 2005.
- P.T. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, *Laporan Keuangan*, Juni 2006.
- Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2000), *Modul 1 : Metode Empiris Data Envelopment Analysis (DEA)*, Yogyakarta.
- Leong W.H and Dollery, Brian (2002), “The Productive Efficiency of Singapore Banks”, *Working paper series, No. 2002-9*, University of New England.
- Leong W.H et al. (2002), “Measuring The Technical Efficiency of Banks in Singapore for The Periode 1993 to 1999 : An Application and Extension of The Bauer et al. (1997) Technique”, *Working paper series, No. 2002-10*, University of New England.
- Lindgren, Carl Johan, and Garcia, G.G. (1996), “Averting the crash : economic institution and financial sector soundness” *SAIS Review - Volume 18, Number 1, Winter-Spring 1998, pp. 19-34*, The Johns Hopkins University Press.
- Manurung, Mandala dan Pratama, Rahardja (2004), *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miller R., and Van Hoose D. (1993), *Modern Money and Banking*, McGraw-Hill, USA.
- Sherman, H.D. and Gold (1985), “Bank Branch Operating Efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, *Journal of Banking and Finance*, **9**, 279–315.
- Siamat, Dahlan (1999), *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.